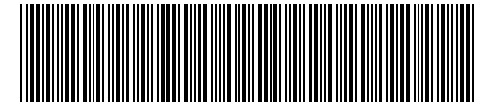




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.663336/2017**



DS:1512-7532-0102-5938

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005)    | MAHKAMAH AGUNG  |
| 2. Unit Organisasi            | : (05)     | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA |
| 3. Provinsi                   | : (22)     | BALI  |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (663336) | PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR                                     |
| Sebesar                       | : Rp.      | 46.750.000 ( EMPAT PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH )     |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)  
005.05.09.1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Jumlah Uang

Rp.	46.750.000
Rp.	46.750.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	46.750.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN D E N P A S A R (037) Rp. 46.750.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Jakarta, 07 Desember 2016  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663336/2017  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1512-7532-0102-5938

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (663336) PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR

Kuasa Pengguna Anggaran : I KETUT KARDA, S.H.  
Bendahara Pengeluaran : SERMA KADEK SUBRATA, S.H.  
Pejabat Penanda Tangan SPM : I WAYAN PARNA, S.H.

Halaman : I A. 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		46.750.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN		46.750.000
2 Program	005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)		46.750.000
Hasil (Outcome)	01	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN		
IKU Program	01	Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN		
	02	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Peradilan TUN		
	03	Prosentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK, Grasi, Sengketa Pajak dan Hak Uji Materiil di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN		
	04	Terselenggaranya Pelayanan Peradilan TUN		
Kegiatan	1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer		46.750.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Penyelesaian Administrasi Perkara Peradilan Militer		
	002	Tenaga Teknis Yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Administrasi		
	003	Pedoman Tenaga Teknis dan Administrasi di Lingkungan Peradilan Militer yang di susun		
	004	Pemenuhan Tenaga Teknis Sesuai Kebutuhan		
	005	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peradilan Militer		
Keluaran (Output)	1058.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu	58,00 Perkara	46.750.000

Jakarta, 07 Desember 2016  
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.  
MULYONO, S.H., S.IP., M.H.  
30395



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663336/2017  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1512-7532-0102-5938

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (663336) PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
663336	PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR	-	46.750	-	-	-	46.750	22 . 51 037	
005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	-	46.750	-	-	-	46.750		
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	-	46.750	-	-	-	46.750		
1058.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu	-	46.750	-	-	-	46.750		
01	RM	-	46.750	-	-	-	46.750		
<b>JUMLAH</b>		-	46.750	-	-	-	46.750		

Jakarta, 07 Desember 2016  
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.  
MULYONO, S.H., S.IP., M.H.  
30395

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663336/2017  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1512-7532-0102-5938

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
Provinsi : (22) BALI  
Kode>Nama Satker : (663336) PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR

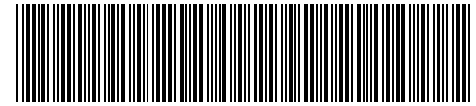
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	663336	PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	430	954	1.674	2.562	2.693	2.992	5.194	5.054	5.479	5.591	6.260	7.867	46.750
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	430	954	1.674	2.562	2.693	2.992	5.194	5.054	5.479	5.591	6.260	7.867	46.750
	005.05.09.1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	430	954	1.674	2.562	2.693	2.992	5.194	5.054	5.479	5.591	6.260	7.867	46.750
		52 BELANJA BARANG	430	954	1.674	2.562	2.693	2.992	5.194	5.054	5.479	5.591	6.260	7.867	46.750

Jakarta, 07 Desember 2016  
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.  
MULYONO, S.H., S.IP., M.H.  
30395

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663336/2017  
IV. C A T A T A N**



DS:1512-7532-0102-5938

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
Provinsi : [22] BALI  
Kode dan Nama Satker : [663336] PENGADILAN MILITER III - 14 DI DENPASAR

Halaman : IV. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 07 Desember 2016  
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.  
MULYONO, S.H., S.IP., M.H.  
30395